

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan berfokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Todaro dalam Wibisonya (2023), proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah strategis pembangunan di tingkat daerah. Pembangunan ini dilaksanakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pembangunan ekonomi daerah yang dimaksudkan adalah sebuah proses dimana terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya, dimungkinkan terbentuknya suatu pola kerjasama atau kemitraan

antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sektor swasta sebagai upaya menciptakan tambahan lapangan kerja dan menstimulus perkembangan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Menurut Mudana & Purbadharmaja (2024), tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Salah satunya tercermin dari kenaikan pendapatan per kapita dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) serta diiringi dengan usaha menekan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka inflasi, meningkatkan produksi, dan nilai tambah produk sektoral.

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada peningkatan output ekonomi suatu negara, yang diukur dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih luas cakupannya. Selain memperhatikan pertumbuhan, juga mencakup aspek-aspek seperti distribusi pendapatan, pemerataan, peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi hanya mengukur peningkatan produksi ekonomi (Mulyana, 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap daerah disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Ketimpangan pembangunan ekonomi pada dasarnya didefinisikan sebagai kondisi tidak meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan antarwilayah. Kemajuan pembangunan suatu wilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mengalahkan pengaruh yang menguntungkan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan suatu wilayah (Noviar, 2021). Ketidakseimbangan ini tercermin dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan kemampuan wilayah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan. Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antarwilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam; 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja; 3) alokasi dana pembangunan antarwilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta; 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; 5) mobilitas barang dan jasa.

Permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah ini mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North (1956) dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Teori tersebut mengemukakan keterkaitan antara pembangunan ekonomi nasional dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Gagasan ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik. Menurut hipotesa Neo-Klasik,

pada awal pembangunan, ketimpangan antarwilayah meningkat karena pusat pertumbuhan berkembang pesat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, jika pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan antarwilayah akan menurun (Zasriati, 2022). Sehingga dalam jangka panjang pembangunan ekonomi diharapkan menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata antarwilayah.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis yang berperan penting dalam menentukan arah dan hasil pembangunan ekonominya. Perbedaan inilah yang menyebabkan variasi dalam kemampuan daerah untuk berkembang. Pembangunan dan aktivitas ekonomi di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, terutama di pusat-pusat pertumbuhan besar seperti Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik (2025), Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,02% pada tahun 2024, jauh di atas Sumatera 22,12%, dan Kalimantan 8,24%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau bahkan stagnan. Ketimpangan kemampuan dalam mencapai pertumbuhan inilah yang akhirnya memunculkan perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Perekonomian suatu daerah diupayakan untuk terus tumbuh dengan tujuan agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Seberapa besar dampak

pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat tergantung dengan besaran pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan pola distribusinya (Zaini, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik (2025), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Menurut Todaro dan Smith dalam Mulia & Saputra (2020), pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah.

Tabel 1.1
PDRB Per Kapita Antarpulau di Indonesia Tahun 2018-2024 (Rupiah)

Pulau	Rata-rata
Pulau Sumatera	40.912.453,79
Pulau Jawa Bali	44.104.222,03
Pulau Nusa Tenggara	15.693.594,28
Pulau Kalimantan	56.693.128,43
Pulau Sulawesi	37.943.803,56
Pulau Maluku	21.895.231,50
Pulau Papua	45.056.104,14

Sumber: Badan Pusat Statistik 2026 (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB per kapita antarpulau di Indonesia memiliki variasi yang signifikan. Pulau Kalimantan tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata PDRB per kapita tertinggi, yakni mencapai Rp56 juta. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Pulau Kalimantan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Tingginya rata-rata PDRB per kapita tersebut dipengaruhi oleh adanya

konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tertentu yang didominasi oleh sektor-sektor unggulan, sehingga mampu mendorong nilai tambah ekonomi yang besar bagi daerah-daerah di Pulau Kalimantan.

Meskipun Pulau Kalimantan memiliki rata-rata PDRB per kapita tertinggi dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, tingginya pendapatan tersebut belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Pulau Kalimantan.

Tabel 1.2
Tingkat Ketimpangan Antarpulau di Indonesia

Wilayah Pembangunan	Indeks Williamson
Pulau Sumatera	0.40
Pulau Jawa Bali	0.73
Pulau Nusa Tenggara	0.23
Pulau Kalimantan	0.72
Pulau Sulawesi	0.15
Pulau Maluku	0.09
Pulau Papua	0.16

Sumber: RPJMN 2020-2024

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Pulau Kalimantan mencapai angka 0.72. Menurut Sjafrizal (2008), jika nilai Indeks Williamson semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin rendah. Sebaliknya, apabila nilai Indeks Williamson semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin tinggi. Oleh karena itu, Pulau Kalimantan dikategorikan

sebagai wilayah dengan ketimpangan tinggi karena memiliki nilai indeks sebesar 0,72 dimana mendekati angka 1.

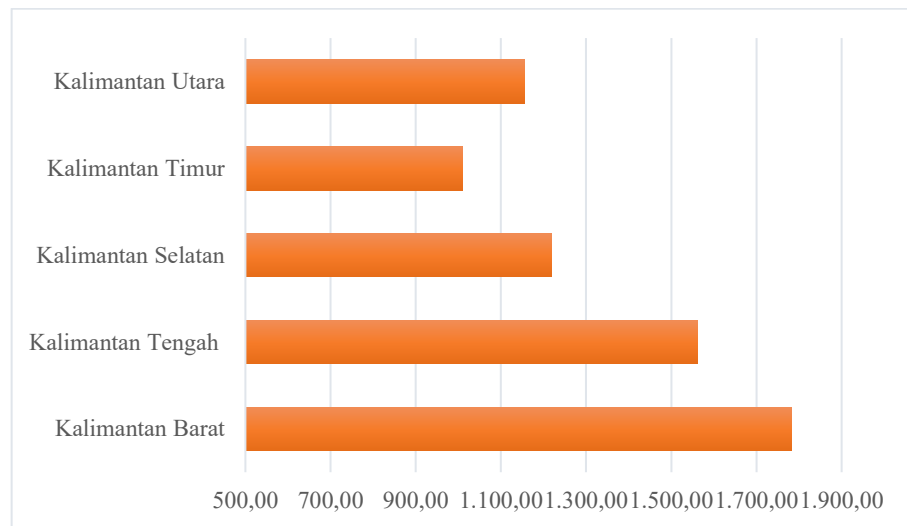
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingginya rata-rata PDRB per kapita di Pulau Kalimantan tidak mencerminkan pemerataan kesejahteraan antarwilayah di Pulau Kalimantan. Sejalan dengan pandangan Williamson dalam Kiton (2019), bahwa pada saat pendapatan per kapita meningkat, maka akan terjadi peningkatan kesenjangan wilayah. Menurut Firman dalam Panggarti et al., (2022), penyebab ketimpangan di Pulau Kalimantan adalah sektor pertambangan yang lebih besar namun tidak merata di suatu kabupaten/kota, sebagian besar PDRB bertumbu pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga sektor ini mengalami tingkat produktivitas yang cukup tinggi dan meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Hal ini menandakan bahwa hasil pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan hanya terpusat di beberapa daerah tertentu, sementara wilayah lainnya belum menikmati manfaat pembangunan secara proporsional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga daerah-daerah tertinggal menghadapi keterbatasan untuk mengembangkan wilayahnya.

Sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, Kalimantan memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang dicanangkan pemerintah sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Selain itu, penetapan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur

semakin memperkuat Kalimantan sebagai wilayah prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan tersebut dilakukan guna mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Relokasi pusat pemerintahan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta mempercepat pertumbuhan wilayah di luar Jawa, khususnya Pulau Kalimantan. Dalam perspektif teori pembangunan wilayah, proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari potensi ketimpangan wilayah. Menurut Myrdal dalam Salsabillah & Fitanto (2024), ketimpangan wilayah ini terjadi karena efek pembalikan (*backwash effect*) lebih dominan dibandingkan efek penyebaran (*spread effect*). Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah di Pulau Kalimantan, jika daerah-daerah sekitar tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan potensi pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan dalam era otonomi daerah, perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor ekonomi unggulan setiap daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Syarifudin et al., 2022). Ada beberapa keuntungan kebijakan otonomi daerah. Pertama, sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masing-masing masyarakat. Kedua, pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ketiga, dengan adanya otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang

akan dilakukan (Sulfadli, 2022). Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah di Pulau Kalimantan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi yang tersedia untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Pajak (2025)

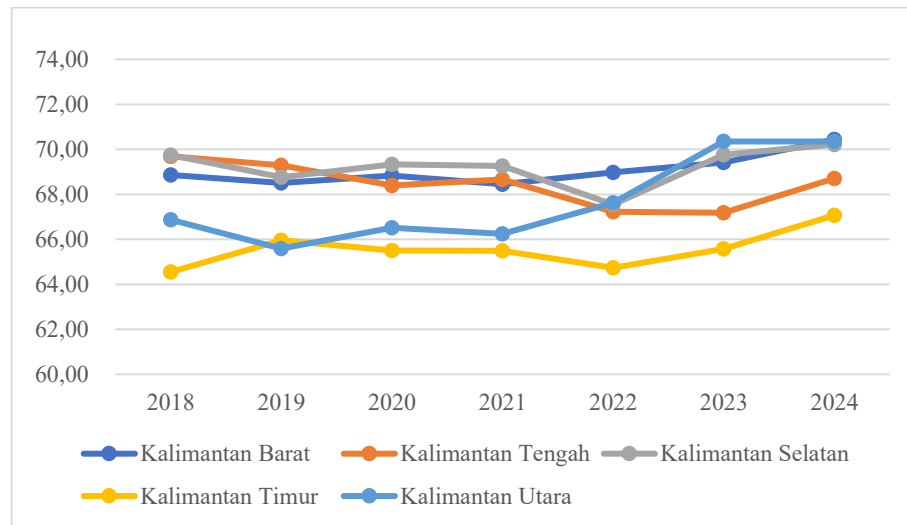
Gambar 1.1
Dana Alokasi Umum Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan adanya variasi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh masing-masing provinsi di Kalimantan, hal ini mencerminkan perbedaan kebutuhan fiskal dan kapasitas keuangan daerah. Provinsi Kalimantan Barat menerima DAU tertinggi mencapai Rp1.700 miliar. Hal ini menunjukkan kebutuhan fiskal yang cukup besar sejalan dengan karakter wilayah yang luas dan tingkat pemerataan yang masih menjadi fokus pemerintah, sehingga memerlukan keuangan pusat lebih besar untuk pelaksanaan layanan publik. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur menerima alokasi terendah, yaitu hanya sebesar Rp1.000 miliar, hal ini dikarenakan kapasitas PAD yang dimiliki

cenderung tinggi, sehingga ketergantungan DAU menjadi rendah karena lebih mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dana alokasi umum memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah. Perbedaan kapasitas fiskal yang signifikan antardaerah berpotensi menciptakan kesenjangan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfurqani et al. (2021) serta Alfiansyah & Budyanra (2019) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya, semakin besar DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah cenderung menurun. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Oktaviani et al. (2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan DAU belum mampu secara nyata mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah.

Untuk menunjang pembangunan diperlukan juga angkatan kerja yang berkualitas. Suatu daerah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tidak diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

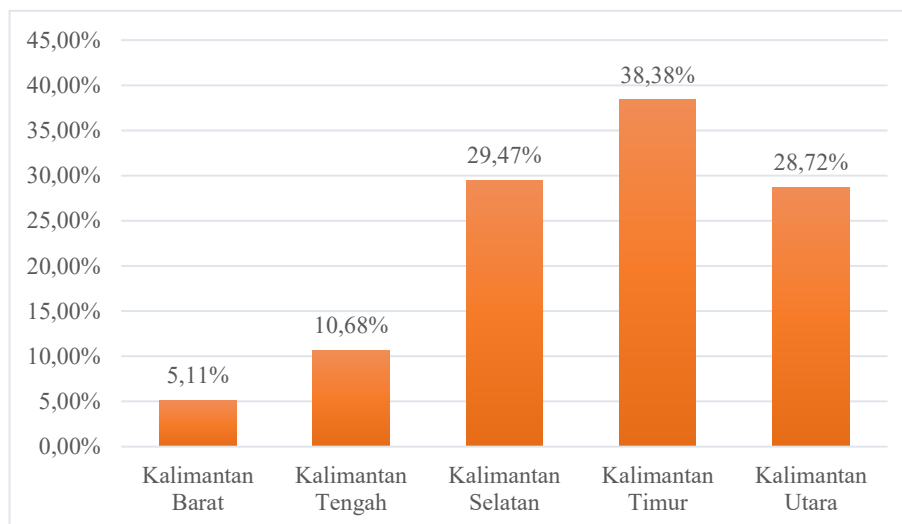
Gambar 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Kalimantan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada tahun 2024. Beberapa provinsi tampak memiliki TPAK yang relatif lebih tinggi secara konsisten dibandingkan provinsi lainnya, ini mengindikasikan adanya perbedaan kinerja pasar tenaga kerja antarwilayah. Pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara memiliki nilai TPAK yang paling tinggi diatas 70%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di provinsi tersebut aktif di pasar kerja. Sementara Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai terendah sebesar 67%, hal ini dikarenakan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstraktif yang menyerap tenaga kerja relatif lebih sedikit.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi antarwilayah berimplikasi langsung pada kemampuan wilayah dalam menciptakan kesempatan kerja. Menurut Noto (2016), daerah dengan kemampuan demografis yang baik akan berdampak pada produktivitas yang tinggi. Semakin tinggi tingkat orang yang bekerja di suatu daerah maka tingkat produktivitasnya semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Pamiati & Woyanti (2021) dan Nisa et al. (2025) menyatakan bahwa TPAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Sementara penelitian oleh Masruri (2016) dan Didia (2016), bahwa TPAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya banyaknya partisipasi angkatan kerja dalam suatu wilayah belum tentu mampu mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi.

Dari sisi sumber daya alam, Kalimantan dikenal sebagai wilayah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor pertambangan dan penggalan. Sektor ini memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah, terutama melalui peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sejalan dengan penelitian oleh W. Hidayat et al. (2014), yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan menempati peringkat pertama dalam pembentukan PDRB daerah di Kabupaten Luwu Timur. Serta Arafah et al., (2022) juga menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalan berpengaruh besar terhadap pendapatan di Papua.

Berikut merupakan perbandingan distribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB provinsi di Pulau Kalimantan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.3
Distribusi PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa distribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Pulau Kalimantan tahun 2024 terkonsentrasi pada Provinsi Kalimantan Timur 38,38%, diikuti Kalimantan Selatan 29,47%, dan Kalimantan Utara 28,72%. Sementara, di Provinsi Kalimantan Tengah hanya menyumbang 10,68% dan Kalimantan Barat 5,11%. Hal ini dikarenakan perekonomian lebih banyak ditopang oleh sektor lain seperti pertanian, industri, dan perdagangan, sehingga tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah & Muzdalifah (2024), menunjukkan bahwa PDRB sektor pertambangan berpengaruh positif signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Zaini (2017), yang menyatakan bahwa kontribusi PDRB sub sektor batu bara berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan kontribusi sektor pertambangan cenderung memperlebar ketimpangan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat, karena manfaat ekonomi yang tidak tersebar secara merata. Sementara itu, penelitian oleh Yewati (2013) menunjukkan hasil yang sebaliknya, bahwa sumber daya alam termasuk pertambangan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini berarti, sumber daya alam dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan apabila manfaat ekonomi yang dihasilkan didistribusikan secara merata antarwilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa ketimpangan merupakan masalah yang kompleks. Ketimpangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Perbedaan struktur ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, serta dana pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing daerah mendorong adanya ketimpangan antarwilayah, salah satunya di Pulau Kalimantan dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Analisis mengenai ketimpangan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena ketimpangan merupakan salah satu tolak ukur dalam proses pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dengan judul **“Pola dan Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2024”**. Penelitian ini

menggunakan variabel dana alokasi umum, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan sumber daya alam tidak terbarukan dengan menggunakan sektor pertambangan dan penggalian yang jarang diuji pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengukur ketimpangan dengan Indeks Williamson, tetapi juga menganalisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah menggunakan Tipologi Klassen, serta regresi data panel untuk menguji faktor penyebab ketimpangan secara kuantitatif. Penggabungan ketiga metode tersebut dilakukan agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, tingkat partisipasi angkatan kerja, sektor pertambangan dan penggalian secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, tingkat partisipasi angkatan kerja, sektor pertambangan dan penggalian secara simultan terhadap ketimpangan

pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024.
2. Untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara dana alokasi umum, tingkat partisipasi angkatan kerja, sektor pertambangan dan penggalian secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara dana alokasi umum, tingkat partisipasi angkatan kerja, sektor pertambangan dan penggalian secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan 2018-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris terkait ketimpangan pembangunan ekonomi serta dapat menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan untuk perumusan strategi pemerataan pembangunan yang lebih terarah, terutama dalam alokasi anggaran yang lebih merata, serta prioritas pembangunan di wilayah tertinggal.

1.5 Lokasi dan Jadwal

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lima provinsi di Pulau Kalimantan dengan rentang waktu 2018-2024, melalui pengambilan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Pajak (DJPK), serta publikasi dan jurnal-jurnal yang menyajikan data-data valid dan terpercaya mengenai perekonomian Indonesia.

